



Article Informations
Corresponding Email:
rismanaf@gmail.com

Received: 07/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI THAILAND TAHUN 2021-2023

Risma Nur Afriyani¹⁾, Agus Subagyo²⁾, Anggun Dwi Panorama³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengelaborasi mengenai Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2021-2023 dengan didasari kenaikan kasus perdagangan manusia di Thailand dan IOM sebagai organisasi yang memiliki mandat memastikan pengelolaan migrasi yang tertib dan manusiawi serta sebagai organisasi yang paling menonjol untuk penanggulangan perdagangan manusia di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan menggunakan wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Berdasarkan teori peran organisasi internasional milik A. LeRoy Bennett, IOM menjalankan peran sebagai sarana kerja sama di Thailand dengan memimpin *The UN Thailand Network on Migration*, memfasilitasi kerja sama Thailand dan Kamboja, serta mendukung ASEAN dalam pembuatan pedoman deklarasi. IOM juga menjalankan perannya sebagai mekanisme administrative dengan mengembangkan *National Referral Mechanism* (NRM) di Thailand. Selain itu, IOM berperan sebagai saluran komunikasi dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand dengan terlibat dalam forum *COMMIT Process* dan *Bali Process*. Dalam menjalankan perannya, IOM memiliki tantangan yakni saluran komunikasi yang belum sepenuhnya terorganisir.

Kata Kunci: Peran, IOM, Thailand, Perdagangan Manusia.

Abstract

This research elaborates on the Role of the International Organization for Migration (IOM) in Combating Human Trafficking in Thailand from 2021 to 2023. This research uses a descriptive analytical qualitative method, employing interviews as primary data and literature study as secondary data. According to A. LeRoy Bennett's theory of the role of international organizations, the IOM plays a role as a cooperation instrument in Thailand by leading The UN Thailand Network on Migration, facilitating

cooperation between Thailand and Cambodia, and supporting ASEAN in creating guideline declarations. The IOM also functions as an administrative mechanism by developing the National Referral Mechanism (NRM) in Thailand. Additionally, the IOM serves as a communication channel in addressing human trafficking in Thailand by participating in the COMMIT Process and the Bali Process forums. However, the IOM faces challenges in fully organizing its communication channels.

Keywords: *Role, IOM, Thailand, Human Trafficking.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang menandai integrasi antarbangsa yang semakin kuat serta meningkatnya aksesibilitas global, tiap-tiap individu menemukan kemudahan yang semakin besar dalam menjalin interaksi sosial dan melakukan mobilitas geografis. Akan tetapi, walaupun kemudahan akses ini membawa manfaat yang signifikan, dampak negatif yang dihasilkan juga tidak bisa diabaikan, salah satunya yaitu tindak perdagangan manusia. Dengan adanya kemudahan akses, orang akan mudah berpergian dengan bebas ke seluruh dunia dan kemudian akan memungkinkan para penjahat melakukan pasar gelap seks dan layanan transplantasi organ (Petrosyan & Khachatryan, 2013). Upaya pemberantasan perdagangan manusia masih terus berlangsung oleh berbagai pihak, termasuk *International Organization for Migration* (IOM) yang memiliki mandat untuk memastikan pengelolaan migrasi yang tertib dan manusiawi. Akan tetapi perdagangan manusia hingga saat ini masih marak terjadi, salah satunya di Thailand yang menjadi negara asal, transit, dan tujuan utama korban perdagangan manusia dari berbagai belahan dunia (Khoirunnisa, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi bagaimana peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand khususnya pada tahun 2021-2023.

IOM mendefinisikan perdagangan manusia sebagai jual beli manusia baik laki-laki, perempuan, anak-anak dari satu negara dan lintas negara untuk dieksploitasi demi keuntungan yang

besar dengan cara eksploitasi seksual, kerja paksa, mengemis paksa, adopsi ilegal, pengambilan organ tubuh dan pernikahan paksa dengan menipu atau mengancam korban perdagangan manusia (International Organization for Migration, n.d.). IOM mengidentifikasi perdagangan manusia dengan melihat empat elemen yakni melintasi perbatasan internasional, keterlibatan fasilitator/penyelundup, uang atau alat pembayaran lain yang berpindah tangan dan masuk/tinggal di negara tujuan dengan illegal (Ali & Pramono, 2011). Perdagangan manusia juga dapat disebut dengan *trafficking in person* yang mana menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* berarti merekrut, menyembunyikan, memindahkan, mengangkut atau menerima seseorang dengan cara ancaman maupun kekerasan, atau dapat melalui bentuk lain seperti penculikan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan kekuasaan, serta membayar orang untuk membeli kendali atas orang tersebut sehingga dapat dieksploitasi melalui prostitusi, eksploitasi seksual, perbudakan, penjualan organ, kerja atau pelayanan paksa (United Nations Office on Drugs and Crime, 2000).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah praktik eksploitasi manusia melalui tindakan merugikan seperti kekerasan atau penipuan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan dapat terjadi melewati lintas batas negara. Karena praktiknya yang dapat terjadi melewati lintas batas negara, perdagangan manusia telah menjadi sebuah ancaman global. Perdagangan manusia dewasa ini masih terus menjadi sorotan sebab masih banyak terjadi di dunia. Salah satu negara yang tidak luput dari ancaman perdagangan manusia adalah Thailand. Thailand diklasifikasikan sebagai peringkat tiga teratas dalam jumlah korban *human trafficking* di Asia Tenggara (Khoirunnisa,

2018). Sejak sekita tahun 1990, korban perdagangan manusia di Thailand telah mencakup sejumlah 80.000 wanita dan anak-anak (Savitri, 2014). Thailand kerap menjadi *hotspot* perdagangan manusia di mana Thailand menjadi negara asal, tujuan, dan negara transit untuk perdagangan manusia (Roujanavong, 2012).

Dalam laporan *U.S. Departement of State Trafficking in Person* tahun 2023 (U.S. Departement of State, 2023), disebutkan Thailand masuk kedalam Tier 2 yang menunjukkan bahwa negara tersebut tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum dalam menghapus bentuk perdagangan manusia, akan tetapi sedang melakukan usaha yang signifikan untuk mencapai standar tersebut. Perdagangan manusia di Thailand terdapat beragam bentuk, dengan eksploitasi seksual sebagai bentuk yang paling umum. Pada tahun 2023, kasus perdagangan manusia terbanyak di negara ini adalah prostitusi, dengan 219 kasus. Selain itu, terdapat 48 kasus terkait pornografi dan 13 kasus eksploitasi seksual lainnya. Ada juga kasus kerja paksa atau perbudakan, di mana korban sering kali memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas, sehingga mereka mencari pekerjaan yang tersedia. Pada tahun 2023, terdapat 31 kasus perdagangan manusia untuk tujuan tenaga kerja (Royal Thai Government, 2023). Selain itu, terdapat kasus pemaksaan untuk memintaminta, serta perdagangan manusia untuk tujuan pengambilan organ (Roujanavong, 2012).

Secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data dari *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts*, kasus perdagangan manusia di Thailand adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Korban Perdagangan Manusia di Thailand

No.	Tahun	Jumlah
-----	-------	--------

1	2013	674
.		
2	2014	280
.		
3	2015	317
.		
4	2016	333
.		
5	2017	302
.		
6	2018	304
.		
7	2019	288
.		
8	2020	133
.		
9	2021	182
.		
10.	2022	253
.		
11.	2023	312

Sumber: Diolah oleh peneliti dari *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* (<https://www.thaianti-humantraffickingaction.org>)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, Thailand mengalami peningkatan kasus perdagangan manusia dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada 2021, 2022, dan 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya sindikat penipuan terkait perdagangan manusia selama dan setelah pandemi Covid-19 (Pongthanyaleela, 2024). Selama dan setelah periode pandemi Covid-19, Asia Tenggara mengalami lonjakan aktivitas digital yang mengacu pada operasi kriminal, khususnya penipuan secara online. Sindikat perdagangan manusia menasar korban secara *online* untuk merekrut korban. Korban yang dituju adalah korban yang sedang memulihkan ekonomi dari dampak pandemi dengan dijanjikan peluang pekerjaan menguntungkan di luar negeri (IOM Regional Office for Asia and The Pacific, 2024).

Perdagangan manusia sampai saat ini masih terus diupayakan penanggulangannya oleh berbagai pihak seperti

pemerintah, organisasi, hukum, maupun individu itu sendiri. Salah satu organisasi yang bergerak untuk *counter trafficking* adalah IOM yang memiliki mandat memastikan pengelolaan migrasi yang tertib dan manusiawi demi kepentingan semua orang (IOM Thailand, 2024d). Untuk menangani perdagangan manusia, IOM memberikan perlindungan kepada pria, wanita, ataupun berbagai gender lainnya serta anak-anak, IOM menggunakan pendekatan yang komprehensif di mana menggunakan semua aspek respons penanggulangan perdagangan manusia (IOM Brussels Regional Office for The European Economic Area, 2024). IOM menggunakan prinsip dalam mengatur penanggulangan perdagangan manusia di antaranya penghormatan terhadap hak asasi manusia, lalu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial individu dan komunitasnya, serta keberlanjutan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil. Selain itu, IOM bekerja sama dengan mitra dalam keterlibatan langsung dengan korban ataupun tindakan pencegahan di suatu negara. IOM berkolaborasi dalam mempromosikan keterampilan hidup sehingga mengurangi kemungkiann perdagangan manusia di masa depan (IOM Thailand, 2024b). Secara berkelanjutan, IOM melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk menginformasikan pembuatan kebijakan berbasis fakta dan memperkuat basis bukti tentang perdagangan manusia. Di Thailand, IOM merupakan organisasi internasional yang menonjol dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia. Thailand memiliki *National Referral Mechanism* (NRM) sebagai kepentingan Thailand untuk menanggulangi perdagangan manusia yang didanai oleh IOM *Development Fund* dan penelitian serta studi untuk pengembangannya didukung oleh IOM. Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan manusia di Thailand, IOM menjadi organisasi internasional yang sangat penting (Pongthanyaleela,

2024).

Dengan Thailand yang menjadi *hotspot* perdagangan manusia dengan menjadi negara asal, transit, dan tujuan dari perdagangan manusia serta kasus perdagangan manusia yang semakin meningkat di Thailand, kemudian IOM sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat memastikan pengelolaan migrasi yang tertib dan manusiawi serta sebagai organisasi yang paling menonjol untuk penanggulangan perdagangan manusia di Thailand sangat dibutuhkan perannya dalam menanggulangi perdagangan manusia. Peneliti berupaya menjawab bagaimana peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2021-2023? Melalui penelitian dengan judul **“Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Thailand tahun 2021-2023.”**

Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang dilakukan pada peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah sebuah eksplorasi masalah yang terkait dengan manusia atau bidang sosial tertentu. Dengan tujuan penelitian yakni memahami masalah tersebut secara mendalam, menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks. Hasil penelitian disajikan dengan menggunakan kata-kata, melaporkan pandangan yang rinci dari sumber informasi serta dilakukan dalam latar yang alamiah (Creswell, 2014). Pada penelitian ini, digunakan konsep *human instrument* yang mana peneliti menjadi peran utama dalam menyusun dan mengorganisir data dalam penelitian kualitatif (Satori & Komariah, 2013). Penelitian kualitatif memiliki beragam teknik pengumpulan data, di antaranya dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk observasi, dokumentasi, wawancara,

studi kepustakaan, dan lain-lain. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara sebagai data primer serta teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian data akan dianalisis dari mengorganisir data sampai merumuskan hipotesa melalui reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011). Setelah data dianalisis, kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui menggunakan bahan referensi, triangulasi, dan membercheck (Sugiyono, 2011).

PEMBAHASAN

Peran IOM Sebagai Sarana Kerja Sama

A. LeRoy Bennett mengatakan bahwa fungsi organisasi internasional salah satunya yakni sarana kerja sama, yang berarti organisasi internasional memberikan sarana untuk bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan untuk semua negara anggota atau sebagian besar negara anggota. Negara-negara menciptakan lembaga-lembaga organisasi internasional untuk menciptakan, menyesuaikan, dan berkompromi untuk mempromosikan kesejahteraan bersama negara-negara anggota dan menyelesaikan masalah yang tidak terbatas pada batas nasional serta mengurangi konflik (Bennett, 1995). Dalam menjalankan perannya sebagai sarana kerja sama, IOM melaksanakan beberapa program di antaranya sebagai berikut.

1. The UN Thailand Network on Migration

PBB melalui GCM, dan IOM sebagai badan di bawah PBB, mewajibkan untuk memastikan migrasi yang aman dan teratur dan IOM memastikan bahwa negara-negara di bawah sistem PBB mengikuti panduan GCM (Pongthanyaleela, 2024). Pada tahun 2021, *The UN Thailand Network on Migration* yang diketuai oleh IOM Thailand dan didukung oleh IOM Thailand sebagai sekretariat, mendukung Pemerintah Kerajaan

Thailand sebagai *Global Compact for Migration* (GMC) *Champion Country* untuk memastikan bahwa migrasi diintegrasikan secara bermakna ke dalam kebijakan nasional pemerintah serta dalam kerangka kelembangaan seperti *UN Country Team's Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) (IOM Thailand, 2021). Pemerintah Kerajaan Thailand kemudian meninjau dan menyetujui rencana kerja yang ditetapkan oleh *The UN Thailand Network on Migration* untuk memberikan kejelasan dan fokus strategis dalam menyampaikan hasil yang konkret dan terukur selama periode 2021-2023. Melalui jaringan ini, isu-isu migrasi dibahas dan ditangani menggunakan pendekatan sistem PBB yang terkoordinasi, yang menambah nilai pada intervensi, memaksimalkan sumber daya, dan menghasilkan pencapaian yang ditargetkan dan nyata.

Dalam melaksanakan kewajibannya, IOM mengadakan pertemuan, memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan mengenai pendekatan kolaboratif untuk menangani isu migrasi dan melaporkan pencapaian *network* kepada Koordinator Residen PBB. IOM juga berkewajiban menjaga dialog berkelanjutan dengan mitra jaringan regional dan global sehingga upaya keseluruhan tetap selaras dan semakin kuat (IOM Thailand, 2024c).

2. Meningkatkan Kolaborasi Bilateral antara Thailand-Kamboja

IOM memfasilitasi kerja sama bilateral antara Thailand dan Kamboja untuk meningkatkan kolaborasi lintas batas dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand juga IOM terlibat dalam pembuatan dokumen atau instrumen MoU yang dikembangkan (Pongthanyaleela, 2024). Hasil dari kerja sama ini adalah dikembangkan dan diadopsinya Prosedur Operasional Standar tentang Kerja Sama Penegakan Hukum antara Thailand dan Kamboja atau *Standard Operating Procedures on Law Enforcement Cooperation between Thailand*

and Cambodia (IOM Thailand, 2022), yang mana ditandatangani oleh Sekretaris Negara Kementerian Dalam Negeri Kamboja dan wakil ketua tetap Komite Nasional Kamboja untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia yakni Chou Bun Eng serta wakil sekretaris tetap Kementerian Pengembangan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, yakni Ramrung Worawat di Bangkok, Thailand (Khmer Times, 2022). *Standard Operating Procedures on Law Enforcement Cooperation between Thailand and Cambodia* dibuat bertujuan melindungi hak dan kepentingan korban.

Selain itu, dengan dasar *Policy Paper: Solutions to Achieve Fair and Ethical Recruitment and Decent Work of Migrant Workers in Thailand during Covid-19 Recovery* yang merupakan rangkuman dari lebih 500 pemangku kepentingan swasta dan publik, IOM memfasilitasi Thailand dan Kamboja mengimplementasi rekomendasi *Acknowledge, Act, Advance* (AAA) yang didukung oleh pemangku kepentingan baik swasta maupun pemerintahan di bawah *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*. Hasil dialog ini adalah Pemerintah Kerajaan Thailand berkomitmen untuk meningkatkan migrasi yang aman (IOM Thailand, 2022). Kemudian, Kementerian Tenaga Kerja menyetujui permintaan dari Pemerintah Kerajaan Kamboja dan Asosiasi Bisnis Thailand melalui pertemuan bilateral antara Thailand dan Kamboja pada Januari 2022. Kesepakatan ini mencakup pengurangan biaya visa untuk pekerja yang tercantum dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), yaitu dari 2.000 THB menjadi 500 THB (IOM Thailand, 2022).

Dengan penurunan biaya visa ini, Thailand bertujuan untuk mempromosikan pekerjaan legal, mengatasi masalah imigrasi ilegal, serta stabilitas pasar tenaga kerja. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meringankan beban finansial bagi

pekerja dan pengusaha. Pengurangan biaya visa diharapkan akan mendorong lebih banyak pekerja asing untuk melegalkan status kerja mereka saat memasuki Thailand, memastikan mereka mendapatkan perlindungan sesuai undang-undang ketenagakerjaan Thailand, serta berkontribusi pada sistem jaminan sosial negara (Lapuekou, 2023).

IOM juga memfasilitasi kerja sama Thailand dan Kamboja dengan berkonsultasi pula dengan *International Labour Organization* (ILO) dalam rangka peningkatan keterampilan pekerjaan sebelum diberangkatkan dari Kamboja ke Thailand. Proses ini melibatkan *Thailand Professional Qualifications Institute* (TPQI) sebagai ketua, Kementerian Tenaga Kerja Thailand, *Employers Confederation of Thailand* (ECOT), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan Kamboja (IOM Thailand, 2024a). Dengan adanya pengembangan keterampilan, pasar tenaga kerja akan mengalami keselarasan dan dapat mengembangkan potensi migran sepenuhnya

3. Bekerja Sama dengan ASEAN

Dalam tingkan regional, IOM Thailand memiliki program tingkat regional yang bekerja sama dengan anggota ASEAN serta badan-badan ASEAN untuk membuat pedoman, seperti contohnya pada deklarasi perlindungan migran di sektor perikanan (Pongthanyaleela, 2024). Pada tahun 2023, IOM, ILO, dan mitra regional lainnya mendukung Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dalam Krisis, dan Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran. Dua deklarasi sini telah diadopsi oleh para pemimpin ASEAN. Selain itu, IOM juga mendukung ASEAN dalam mengembangkan Pedoman ASEAN untuk melengkapi deklarasi-deklarasi tersebut guna membantu negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen tersebut

(Pongthanyaleela, 2024).

Dukungan ini dimulai dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional pada 18 Desember yang kemudian AICHR bersama dengan dukungan IOM, IOJI, IJM menyelenggarakan Forum ASEAN tentang Hak Asasi Manusia di Laut: Menjamin Pekerjaan Layak untuk Nelayan Migran pada 14-15 Desember 2023 di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta baik secara offline maupun online, mewakili pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Negara Anggota ASEAN, termasuk organisasi masyarakat sipil, universitas, nelayan migran, serikat nelayan migran, dan sektor swasta (IOM Indonesia, 2023).

Forum ini membahas rumusan pengembangan Pedoman tentang Implementasi Deklarasi ASEAN mengenai Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran, berdialog mengenai isu hak asasi manusia dan migrasi, isu penyimpangan hak asasi manusia di laut, perdagangan manusia, bisnis hak asasi manusia, serta kerentanan nelayan migran dan meningkatkan perlindungan di laut. IOM memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota ASEAN untuk meninjau dan merevisi kebijakan dan peraturan mereka serta menegakkan prinsip non-diskriminasi, *gender-sensitive*, *responsive* dengan mengakui kerentanan nelayan migran serta meningkatkan pengumpulan dan manajemen data terkait nelayan migran dan keluarga mereka (IOM Indonesia, 2023).

Sebagai negara yang menjadi pasar penting *seafood* di dunia, Deklarasi mengenai Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran menjadi penting sebab di Thailand sendiri, perdagangan manusia di industri perikanan masih menjadi masalah akut dalam industri perikanan Thailand (Haebahan, 2018). Perdagangan manusia di industri perikanan mencakup penjualan manusia untuk bekerja di

kapal untuk dieksploitasi tenaga korban yang dituntut katahahan fisik yang tinggi dan mampu bekerja di lokasi yang jauh

IOM telah menunjukkan dirinya sebagai sarana kerja sama oleh negara anggotanya dalam upaya mengatasi berbagai tantangan terkait perdagangan manusia, termasuk di Thailand. Organisasi ini berhasil menyediakan platform yang memungkinkan negara-negara anggota dapat bekerja sama baik dengan sektor pemerintah maupun organisasi internasional lain untuk menyelesaikan isu-isu yang melampaui batas kedaulatan nasional sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara. Hal ini sangat penting karena masalah-masalah seperti perdagangan manusia seringkali melibatkan berbagai negara dan membutuhkan pendekatan multilateral untuk menyelesaikannya.

Peran IOM Sebagai Mekanisme Administratif

Dalam menjalankan perannya, Bennett mengatakan bahwa organisasi internasional setelah melakukan kerja sama akan menerjemahkan keputusan-keputusan kerja sama menjadi suatu tindakan nyata (1995) seperti mempengaruhi kebijakan ataupun pembuatan program di suatu negara.

1. Pengembangan *National Referral Mechanism* (NRM)

Dalam menangani perdagangan manusia, IOM Thailand memiliki program khusus yang disebut *National Referral Mechanism*, yang menjadi kepentingan Pemerintah Kerajaan Thailand serta lembaga- lembaga pemerintah terkait. Program ini melibatkan kerja sama antara Pemerintah Kerajaan Thailand, lembaga-lembaga pemerintah terkait, IOM, dan organisasi lain yang kemudian bekerja di bawah *National Referral Mechanism*, dan didanai oleh *IOM Development Fund* (Pongthanyaleela, 2024). Dengan Thailand yang menjadi titik strategis bagi sindikat perdagangan manusia baik sebagai negara transit maupun tujuan serta penurunan peringkat

Thailand menjadi Tier 2 Watch List pada tahun 2021, IOM mendukung pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk Mekanisme Rujukan Nasional tentang Perlindungan dan Bantuan Korban Perdagangan Manusia. Mekanisme Rujukan Nasional adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mencatat korban perdagangan manusia atau perbudakan modern dan memastikan mereka menerima dukungan yang sesuai (National Police Chiefs' Council, 2023).

Rencana Aksi Nasional untuk Mekanisme Rujukan Nasional tentang Perlindungan dan Bantuan Korban Perdagangan Manusia atau *National Referral Mechanism (NRM) for Victim of Trafficking* dirancang untuk memfasilitasi operasi agensi-agensi terkait dalam berkoordinasi, berbagi informasi, memberikan bantuan rujukan, dan perlindungan bagi korban perdagangan manusia serta kerja paksa atau pelayanan untuk mengakses layanan dukungan primer (Steering Committee of the National Referral Mechanism, 2023). Spesifikasi satu negara dengan negara lain mengenai NRM beragam, adapun poin utama dari NRM di Thailand adalah memberikan periode refleksi selama 45 hari untuk identifikasi korban. NRM ini disetujui oleh Anti-Trafficking in Person Committee pada Maret 2022, termasuk dalam 45 hari digunakan untuk menghormati proses pemulihan korban dan penentuan nasib sendiri di tempat di mana korban bebas dari rasa takut terhadap pelaku (MIURA, 2022).

Rencana Aksi Nasional untuk Mekanisme Rujukan Nasional tentang Perlindungan dan Bantuan Korban Perdagangan Manusia ini disahkan pada tahun 2022 bersamaan dengan pedoman untuk memungkinkan operasinya di seluruh lapisan negeri di mulai nasional hingga ke provinsi (IOM Thailand, 2022). NRM di Thailand dikembangkan dari peraturan perundang-undangan serta pedoman kerangka kerja operasional sesuai dengan operasi

yang memenuhi standar internasional. Secara bersamaan, IOM mendukung Pemerintah Kerajaan Thailand untuk memperkuat kapasitas penyaringan, identifikasi, rujukan, dan koordinasi melalui pengembangan dan pelaksanaan NRM untuk korban perdagangan manusia. IOM juga memberi dukungan teknis untuk mengoperasikan NRM untuk korban perdagangan manusia di Thailand baik di tingkat pusat maupun provinsi (IOM Thailand, 2024a).

IOM telah menunjukkan peran pentingnya sebagai mekanisme administratif di Thailand dalam mengatasi isu perdagangan manusia melalui pengembangan *National Referral Mechanism* (NRM) yang merupakan kepentingan dari Thailand itu sendiri. Program ini tidak hanya merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk melindungi korban perdagangan manusia, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat kerangka kebijakan nasional Thailand terkait perlindungan dan bantuan bagi korban. **Peran IOM Sebagai Saluran Komunikasi**

Menurut Bennett, organisasi internasional menyediakan jalur komunikasi antar pemerintah untuk memudahkan akses apabila ada masalah muncul. IOM menjalankan perannya sebagai saluran komunikasi melalui forum berikut.

1. *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT Process)*

COMMIT Process merupakan forum regional yang berbentuk sebagai progress konsultatif regional mengenai migrasi di wilayah Asia. Negara-negara dalam forum ini terdiri dari negara yang masuk dalam wilayah Sub-regional Mekong yakni China, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand (International Organization for Migration, 2024). *COMMIT Process* dimulai ketika pertengahan tahun 2003 ketika pemerintah di Sub-regional Mekong menyadari bahwa untuk menanggulangi perdagangan manusia tidak bisa dilakukan secara efektif oleh negara itu sendiri, suatu negara

membutuhkan negara lain untuk memerangi perdagangan manusia. Kemudian IOM masuk ke dalam *COMMIT Process* secara bertahap, dimulai atas permintaan UNDP yang merupakan secretary of the economic process dan melalui persetujuan enam negara di Sub-regional Mekong, IOM kemudian masuk dan mendukung *COMMIT Process* sebagai peran sekretaris dari *COMMIT Process* (Pongthanyaleela, 2024).

COMMIT Process memiliki area diskusi khusus yang meliputi memerangi perdagangan manusia, memerangi penyelundupan migran, memerangi kerja paksa, serta mekanisme rujukan transnasional untuk korban perdagangan manusia. *COMMIT Process* berisi dialog kebijakan Tingkat tinggi di mana negara yang tergabung dalam forum membuat kerangka kerja sama sebagai respons anti-perdagangan manusia yang dibangun secara komprehensif (International Organization for Migration, 2024). Negara-negara Sub-regional Mekong menggabungkan upaya pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban dan pemulangan serta reintegrasi mereka, penuntutan terhadap pelaku.

COMMIT Process dimulai sebagai serangkaian diskusi informal antara perwakilan dari beberapa pemerintah Sub-regional Mekong yang kemudian mencapai kesepakatan untuk kolaborasi dalam memerangi perdagangan manusia di Sub-regional Mekong dengan bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang mana isinya berkata perdagangan manusia berdampak pada keamanan manusia dan hak asasi manusia individu dan perdagangan manusia timbul dari kurangnya keamanan manusia dan diperlukan penanganan baik di tingkat individu, masyarakat, nasional, regional, dan internasional (International Organization for Migration, 2024). Dengan hadirnya *COMMIT Process*,

kepercayaan dan keyakinan antara negara-negara Sub-regional Mekong terkait isu perdagangan manusia dapat dikembangkan, serta *COMMIT Process* dapat mengembangkan sistem yang efektif untuk pengembangan dan implementasi kegiatan bersama. Selain memfasilitasi pemangku kebijakan negara-negara di Sub-regional Mekong, *COMMIT Process* juga memfasilitasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan regional melalui The COMMIT CSO/Youth Commit.

COMMIT Process dilakukan secara berkelanjutan, yang mana diatur oleh enam Satgas Nasional COMMIT yang masing-masing terdiri atas pejabat pemerintah di kementerian polisi, kehakiman, kesejahteraan sosial, dan penanganan perempuan. Satgas Nasional COMMIT mengumpulkan perwakilan dari Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Sosial, beberapa organisasi internasional dan masyarakat sipil. Satgas Nasional COMMIT akan bertemu secara berkala di setiap negara dan membuat keputusan mengenai program dan kebijakan anti-perdagangan manusia dengan melihat pada rencana tahunan *COMMIT Process*.

Di tahun 2022, Thailand menjadi host dalam *COMMIT Process* dengan dipimpin oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia yang diwakili oleh Mr. Anukul Peedkaew secara onsite dan online di Hotel S Ratchada Leisure, Bangkok pada tanggal 15-16 Desember 2022 dengan tema “*Strengthening Lasting and Sustainable Multi-Lateral Cooperation to End Trafficking in Persons*” (Bangkok Post, 2022).

COMMIT Process pada tahun 2022 diikuti oleh 200 perwakilan dari enam anggota yakni Kamboja, China, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Mereka saling bertukar informasi mengenai situasi dan solusi untuk perdagangan

manusia, serta meninjau pelaksanaan rencana aksi pada fase empat yakni 2015-2022, dan pengembangan rencana aksi fase 5 (Bangkok Post, 2022). *COMMIT Process* penting dalam menangani perdagangan manusia di tingkat sub-regional karena perdagangan manusia tidak dapat terjadi dengan tindakan nasional saja, akan tetapi diperlukan adanya persamaan paradigma dan kerja sama.

2. *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*

Bali Process adalah forum regional yang mendukung kolaborasi, dialog, dan pengembangan kebijakan terkait migrasi tidak teratur di kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya (The Bali Process, 2024a). Di dalam *Bali Process*, pejabat pemerintah, praktisi, dan ahli dari Negara Anggota dan Organisasi di dalam *Bali Process* dipertemukan dengan tujuan untuk memajukan pekerjaan seputar isu dan prioritas regional utama serta memastikan bahwa *Bali Process* responsif terhadap tantangan baru yang sedang berkembang (The Bali Process, 2024a). *Bali Process* memiliki 45 anggota yang terdiri atas Asia Pasifik serta Eropa dan Amerika Utara serta empat organisasi internasional yakni UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO. *Bali Process* juga memiliki 18 negara pengamat dan sembilan organisasi pengamat (The Bali Process, 2024b). Area kerja sama mereka mencakup penegakan hukum, keterlibatan pemangku kepentingan, berbagi informasi dan kampanye publik, migrasi tidak teratur dan kejahatan transnasional, manajemen perbatasan, perlindungan korban dan manajemen migrasi, pemulangan dan reintegrasi, serta koordinasi dan dukungan (The Bali Process, 2024a).

IOM sendiri termasuk ke dalam *Bali Process Steering Group* bersama dengan Australia, Indonesia, Selandia Baru, Thailand, dan UNHCR yang bertanggung jawab untuk

memastikan tujuan dan prioritas *Bali Process* mencerminkan kebutuhan regional dengan memperhatikan tren dan isu yang sedang berkembang. IOM bekerja sama dengan *Bali Process* yang mana meninjau hukum atau undang-undang mengenai anti-Trafficking in Person di negara-negara regional Asia Tenggara (Pongthanyaleela, 2024). Selain itu, *Bali Process* Steering Group berperan dalam menetapkan agenda untuk Ministerial Conferences yang diselenggarakan dua tahun sekali, *Bali Process* Steering Group juga mengarahkan perubahan pada tata kelola *Bali Process* misalnya dengan menentukan anggota Ad Hoc, dan mengawasi seluruh kegiatan dan prioritas *Bali Process* (The Bali Process, 2024c).

IOM telah memainkan peran penting sebagai saluran komunikasi di Thailand, memfasilitasi dialog lintas negara dalam memerangi perdagangan manusia. Sebagai organisasi internasional, IOM menjembatani komunikasi antara pemerintah maupun organisasi internasional lain untuk mengatasi masalah perdagangan manusia dengan memperhatikan tren terbaru dari masalah perdagangan manusia sehingga masalah yang ada dan baru dapat teratasi.

Tantangan IOM dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2021-2023

Dalam wawancara dengan Samavi Pongthanyaleela, *National Project Officer Counter Trafficking Issue* di IOM Thailand diungkapkan bahwa selama periode 2021-2023, IOM Thailand menghadapi beberapa tantangan besar dalam menangani perdagangan manusia. Pada periode 2021 sampai 2023, setiap organisasi di Thailand merasa kewalahan dengan tanggung jawab yang semakin meningkat dalam perdagangan manusia karena sindikat penipuan yang dilakukan untuk perdagangan manusia semakin banyak dilaporkan terjadi, bersamaan dengan implementasi *National Referral Mechanism*. Pada *fiscal year*,

Pemerintah Kerajaan Thailand tidak memungkinkan untuk melakukan persiapan sumber daya untuk menanggulangi situasi ini. *National Referral Mechanism* yang baru saja diimplementasikan membutuhkan anggaran, proses, keahlian, dan tenaga kerja lebih banyak sehingga menyebabkan pelaksana NRM merasa kewalahan dengan meningkatnya sindikat penipuan. IOM bersama dengan organisasi lain juga perlu memberikan dukungan tambahan kepada Pemerintah Kerajaan Thailand, hal ini menjadi tantangan kepada Pemerintah Kerajaan Thailand dan juga IOM.

Tantangan lain yang dihadapi adalah situasi penipuan terjadi melewati lintas batas negara. Kebanyakan kasus penipuan terjadi di negara-negara tetangga Thailand, sehingga Pemerintah Kerajaan Thailand tidak memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum, investigasi, atau proses peradilan. Pemerintah Kerajaan Thailand tidak memiliki yuridiksi untuk masuk ke negara-negara tetangga untuk mengumpulkan bukti. Hal ini membutuhkan kolaborasi lintas batas dengan negara-negara tetangga melalui perjanjian bilateral resmi demi penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menyelidiki kasus perdagangan manusia.

Situasi perdagangan manusia di Thailand juga melebar bukan hanya melibatkan warga negara Thailand atau warga negara tetangga, akan tetapi melibatkan warga negara lain secara internasional yang menggunakan Thailand sebagai jalur transit perdagangan manusia. Saluran komunikasi yang belum sepenuhnya terorganisir membuat hal ini menjadi tantangan, sehingga IOM maupun Pemerintah Kerajaan Thailand perlu lebih erat bekerja dengan perwakilan diplomatik dalam berbagi tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya. Melalui GCM, kolaborasi antar negara-negara terkait sangat diharapkan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan perwakilan diplomatik terkait untuk menghubungkan dengan Pemerintah Kerajaan Thailand

agar membantu para penyintas dari negara tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengelaborasi peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand tahun 2021-2023 menggunakan teori A. LeRoy Bennett yang mana organisasi internasional memiliki peran di antaranya sarana kerja sama, mekanisme administratif, serta menjadi saluran komunikasi antar negara dan berbagai pemangku kepentingan.

IOM telah berhasil menyediakan sarana kerja sama yang melibatkan sektor pemerintah dan mitra regional maupun global untuk menyelesaikan isu-isu yang melampaui batas kedaulatan nasional, serta mempromosikan hak asasi manusia dan kesejahteraan migran. IOM berperan dalam memimpin *The UN Thailand Network on Migration* yang memfasilitasi diskusi, menjaga dialog dengan mitra regional serta global dan memastikan migrasi diintegrasikan secara bermakna ke dalam kebijakan nasional. IOM juga memfasilitasi kerja sama bilateral antara Thailand dan Kamboja dan menghasilkan MoU seperti *Standard Operating Procedures on Law Enforcement Cooperation* antara kedua negara untuk melindungi hak dan kepentingan korban. Kemudian pengurangan biaya visa kerja dan pelatihan keterampilan bagi pekerja Kamboja. Di tingkat regional, IOM mendukung ASEAN dalam membuat pedoman pada deklarasi perlindungan pekerja migran dalam krisis dan penempatan dan perlindungan nelayan migran.

IOM telah berperan sebagai mekanisme administratif yang penting di Thailand dalam menangani isu perdagangan manusia melalui pengembangan *National Referral Mechanism* (NRM). Program ini merupakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan memberikan dukungan yang sesuai bagi korban perdagangan manusia. Kontribusi IOM dalam pengembangan

dan pelaksanaan NRM di Thailand tidak hanya melindungi korban perdagangan manusia, tetapi juga memperkuat kerangka kebijakan nasional Thailand terkait perlindungan dan bantuan bagi korban.

Sebagai organisasi internasional, IOM memfasilitasi dialog lintas negara dan antar organisasi untuk mengatasi isu perdagangan manusia dengan mempertimbangkan tren terbaru dan tantangan yang sedang berkembang. IOM berhasil membangun jembatan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional melalui *COMMIT Process* serta *Bali Process*. Melalui forum dan dialog yang difasilitasi oleh IOM, negara-negara dapat secara berkelanjutan menangani isu perdagangan manusia, memperkuat hubungan antar negara, dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, IOM di Thailand telah menjalankan perannya sebagai organisasi internasional yakni sebagai sarana kerja sama, mekanisme administratif, dan saluran komunikasi. Akan tetapi IOM masih menghadapi tantangan yakni saluran komunikasi yang belum sepenuhnya terorganisir, IOM perlu memperluas saluran komunikasi kepada perwakilan diplomatik dengan jangkauan internasional yang lebih luas.

REFERENSI

- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Bangkok Post. (2022, December 21). Thailand hosts COMMIT meeting against trafficking in six Mekong countries. Bangkok Post. <https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2465820/thailand-hosts-commit-meeting-against-trafficking-in-six-mekong-countries>
- Bennett, A. L. (1995). *International Organizations: Principles and Issues (Sixth Edition)*. Prentice-Hall International, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative,*

Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition). SAGE Publications, Inc.

Haebahan, P. A. (2018). Kerjasama Thailand dan Amerika Serikat dalam menangani kasus Slavery and Human Trafficking di Industri Perikanan Thailand 2013-2017 [Skripsi, Universitas Diponegoro].
<http://eprints.undip.ac.id/70321/>

International Organization for Migration. (n.d.). IOM X Factsheet Human Trafficking. International Organization for Migration. Retrieved April 13, 2024, from
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/infographic/IOMXF_actsheets_General.pdf

International Organization for Migration. (2024). Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT Process).
International Organization for Migration.
<https://www.iom.int/coordinated-mekong-ministerial-initiative-against-trafficking-commit-process>

IOM Brussels Regional Office for The European Economic Area, T. E. U. and N. (2024). Counter Trafficking in Human Beings. International Organization for Migration.
<https://eea.iom.int/counter-trafficking-human-beings>

IOM Indonesia. (2023, December 21). IOM Supported AICHR-led ASEAN Forum on Human Rights at Sea to Strengthen Migrant Fishers Protection. International Organization for Migration. <https://indonesia.iom.int/news/iom-supported-aichr-led-asean-forum-human-rights-sea-strengthen-migrant-fishers-protection>

IOM Regional Office for Asia and The Pacific. (2024). IOM's Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia.
https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2024-03/iom-southeast-asia-trafficking-forced-criminality-update_december-2023-1.pdf

IOM Thailand. (2021). Annual Report 2021.
<https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbd11371/files/documents/iom-thailand-annual-report-2021.pdf>

- IOM Thailand. (2022). Annual Report 2022.
https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbd11371/files/documents/2023-05/05.11_annual-report-2022.pdf
- IOM Thailand. (2024a). Annual Report 2023.
<https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbd11371/files/documents/2024-05/iom-thailand-annual-report-2023-english.pdf>
- IOM Thailand. (2024b). Counter-Trafficking. International Organization for Migration. <https://thailand.iom.int/counter-trafficking>
- IOM Thailand. (2024c). Global Compact for Migration. International Organization for Migration. <https://thailand.iom.int/global-compact-migration>
- IOM Thailand. (2024d). Who We Are. International Organization for Migration. <https://thailand.iom.int/who-we-are>
- Khmer Times. (2022, August 30). Cambodia, Thailand sign agreement on combating human trafficking. Khmer Times.
<https://www.khmertimeskh.com/501141318/cambodia-thailand-sign-agreement-on-combating-human-trafficking/>
- Khoirunnisa, A. (2018). Implementasi Asean Plan Of Action To Combat Transnational Crimes (Studi Kasus Human Trafficking Di Thailand Pada Tahun 2006-2010). GLOBAL INSIGHT JOURNAL, 3(2).
<https://doi.org/10.52447/gij.v3i2.1673>
- Lapuekou, C. (2023, October 31). Thailand Reduces Work Permit Fees for Employees from Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam. The Laotian Times.
<https://laotiantimes.com/2023/10/31/thailand-reduces-work-permit-fees-for-employees-from-laos-cambodia-myanmar-vietnam/>
- MIURA, M. (2022). Kingdom of Thailand, project for strengthening regional network for combating trafficking in persons (TIP) in Mekong region short-term expert (counter-trafficking in persons) project activity : completion report.
<https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000049211.pdf>
- National Police Chiefs' Council. (2023). The National Referral Mechanism. National Police Chiefs' Council. <https://www.npcc-msoicu.co.uk/about-msoic/the-national-referral-mechanism/>
- Petrosyan, S., & Khachatryan, H. (2013). Human Trafficking:

Manual for Lecturers and Students.
International Organization for Migration
Mission in
Armenia.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/university_manual_hum_antrafficking_eng.pdf

Pongthanyaleela, S. (2024, 8 2). The Role of International Organization for Migration in Combating Human Trafficking in Thailand in 2021-2023. (R. N. Afriyani, Pewawancara)

Roujanavong, W. (2012, August). Human Trafficking: A Challenge to Thailand and The World Community. RESOURCE MATERIAL SERIES.

Royal Thai Government. (2023). Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts: 1 January - 31 December 2023.
<https://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2024/02/2023-Country-Report-FINAL-as-of-25-Jan2-2.pdf>

Satori, D., & Komariah, A. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Cet. 2). Alfabeta.

Savitri, R. A. (2014). Upaya Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Steering Committee of the National Referral Mechanism. (2023). Guidelines on The National Referral Mechanism to Protect and Assist Survivors of Trafficking in Thailand. International Organization for Migration.
<https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbd11371/files/documents/2024-03/guidelines-on-nrm-to-protect-and-assist-survivors-en.pdf>

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

The Bali Process. (2024a). About the Bali Process. The Bali Process. <https://www.baliprocess.net/about-the-bali-process/>

The Bali Process. (2024b). Bali Process Members. The Bali Process. <https://www.baliprocess.net/bali-process-members/>
The Bali Process. (2024c). Bali Process Steering Group. The Bali Process. <https://www.baliprocess.net/bali-process-steering-group/>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2000, November 15). United Nations Convention against Transnational Organized

Crime and the Protocols
United Nations.

Thereto.
Nations.
[https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC
%20Convention/TOCebook-e.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf)

U.S. Department of State. (2023). Trafficking in Persons Report June 2023.https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/05/Trafficking-in-Persons-Report-2023_Introduction-Additional-Pagesv4_FINAL.pdf